LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)



DINAS SOSIAL
KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

LAPORAN	1
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)	1
DAFTAR ISI	2
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Manfaat	1
1.3 Metode Pengumpulan Data	2
1.4 Waktu Pelaksanaan SKM	3
1.5 Penentuan Jumlah Responden	3
BAB II	4
ANALISIS DATA SKM	4
2.1 Analisis Responden	4
2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan	6
2.3 Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut	7
2.4 Tren Nilai SKM	8
BAB III	9
HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA	9
BAB IV	11
KESIMPULAN	11
LAMPIRAN	12
1. Kuesioner	12
2. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM (Foto-Foto Pelaksanaan SKM)	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah 96 Tahun 2012 Nomor tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat tersebut diharapkan dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran. Untuk menjalankan amanat kedua kebijakan tersebut, maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna melibatkan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

Dinas Sosial kabupaten Ngawi menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat untuk mengukur kualitas pelayanan. Hasil survei ini akan digunakan sebagai acuan perbaikan pelayanan publik yang dituangkan dalam rencana tindak lanjut sehingga dapat tercapai pelayanan prima yang sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat sebagai pengguna layanan. Dalam laporan ini juga disampaikan realisasi tindak lanjut dari pelaksanaan survei pada periode sebelumnya, sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Pelaksanaan SKM bertujuan untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan. Adapun manfaat yang diperoleh melalui SKM, antara lain:

- 1. Mengidentifikasi kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan;
- 2. Mengetahui kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan

- publik secara periodik;
- 3. Mengetahui indeks kepuasan masyarakat pada lingkup organisasi penyelenggara pelayanan maupun instansi pemerintah;
- 4. Meningkatkan persaingan positif antar organisasi penyelenggara pelayanan;
- 5. Menjadi dasar penetapan kebijakan maupun perbaikan kualitas pelayanan; dan
- 6. Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kinerja organisasi penyelenggara pelayanan.

1.3 Metode Pengumpulan Data

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara mandiri oleh Dinas Sosial Kabupaten Ngawi. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, telah dibentuk tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat yang bertanggungjawab dalam seluruh tahapan survei.

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur dalam kuesioner SKM Dinas Sosial Kabupaten Ngawi yaitu:

- Persyaratan: Persyaratan adalah ketentuan teknis maupun administratif yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis layanan dan dipublikasikan melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- 2. **Sistem, mekanisme dan prosedur**: Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan, serta pemantauan terhadap potensi kecurangan dalam pelaksanaannya.
- 3. **Waktu penyelesaian**: Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- 4. **Biaya/ tarif**: Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Unsur ini juga mencakup pengawasan terhadap praktik percaloan serta potensi pungutan liar dalam pelaksanaan pelayanan.

- 5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan**: Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
- 6. **Kompetensi pelaksana**: Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman
- 7. **Perilaku pelaksana**: Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
- 8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan**: Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
- 9. **Sarana dan prasarana**: Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan pada penyelenggaraan pelayanan, baik secara luring, daring maupun hybrid.

1.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu 4 bulan yaitu bulan juni-september. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 4 bulan .

1.5 Penentuan Jumlah Responden

Penentuan jumlah responden dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No.14 Tahun 2017. Populasi penerima layanan sebanyak 330 orang dan sampel sebanyak 330 responden .

BAB II ANALISIS DATA SKM

2.1 Analisis Responden

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 330 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

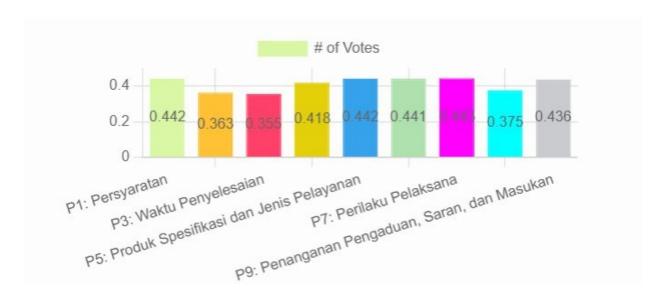
No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	Jenis Kelamin	Laki-Laki	60	19%
		Perempuan	270	81%
2	Pendidikan	Tidak Sekolah		
		SD/Sederajat		
		SMP/Sederajat		
		SMA/Sederajat		
		D1/D2/D3		
		D4/S1		
		S2		
		S3		
3	Pekerjaan	ASN		
		TNI		
		POLRI		
		Swasta		
		Wirausaha		
		Ibu Rumah Tangga		
		Pelajar/Mahasiswa	299	
		Petani/Nelayan		
		Pekerja		
		Lepas/Freelance		
		Pensiunan		

	Lainnya	
Pengguna Layanan	Non Disabilitas	
	Disabilitas	
Disabilitas	Disabilitas Fisik	
	Disabilitas	
	Intelektual	
	Disabilitas Mental	
	Disabilitas Sensorik	

2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat

Nomor Urut Responden	Parameter								
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
Jumlah Nilai per	1314	1079	1054	1240	1312	1309	1317	1114	1295
Parameter (JP)									
Nilai Rata-rata (NRR) per	3.982	3.270	3.194	3.758	3.976	3.967	3.991	3.376	3.924
Parameter									
Nilai Indeks per	0.442	0.363	0.355	0.418	0.442	0.441	0.443	0.375	0.436
Parameter									
Indeks Kepuasan	92.88								
Masyarakat (IKM)									
Kategori Penilaian	Sangat Baik								
Kepuasan Pelayanan									

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur



2.3 Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut

Dari hasil analisis data SKM tahun ini, kami mengidentifikasi bahwa aspek Perilaku Pelaksana mendapatkan persepsi tertinggi dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sikap ramah, sopan, dan profesionalitas petugas telah berjalan baik dan menjadi kekuatan utama dalam pelayanan.

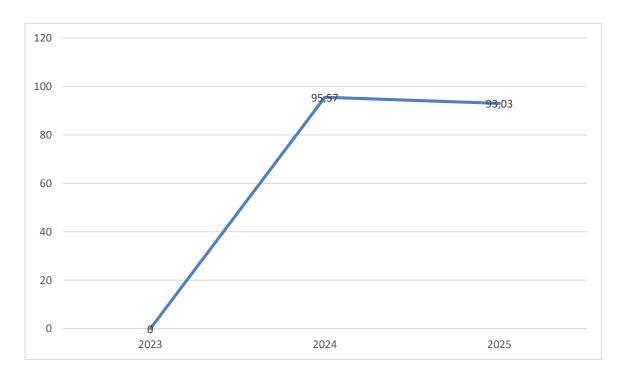
Namun demikian, secara kuantitatif aspek Waktu Penyelesaian memperoleh nilai terendah dibandingkan dimensi lainnya, diikuti oleh aspek Prosedur Pelayanan sebagai nilai terendah kedua. Hasil ini mengindikasikan bahwa masyarakat masih merasakan lamanya durasi penyelesaian layanan, serta menilai alur prosedur yang ada belum cukup sederhana dan mudah dipahami.

Secara kualitatif, masukan yang kami terima melalui kritik dan saran sebagian besar menyoroti proses layanan yang dianggap terlalu lama, adanya tahapan yang berulang, serta prosedur yang dinilai berbelit dan belum sepenuhnya transparan. Kondisi ini berpotensi menurunkan tingkat kepuasan secara keseluruhan meskipun perilaku petugas sudah positif.

No.	Unsur	Rencana Tindak Lanjut	Waktu	Penanggung Jawab
1.	Prosedur	Menyusun ulang prosedur	3 bulan	Kepala Bidang
	Pelayanan	pelayanan agar lebih		Perlindungan
		sederhana, jelas, dan mudah		Jaminan Sosial
		dipahami oleh masyarakat.		
2.	Waktu	Melakukan evaluasi dan	3 bulan	Kepala Bidang
	Penyelesaian	peninjauan ulang SOP		Perlindungan
		pelayanan untuk memangkas		Jaminan Sosial
		tahapan yang tidak efisien		
		sehingga durasi penyelesaian		
		lebih cepat dan terukur.		

2.4 Tren Nilai SKM

Tren tingkat kepuasan penerima layanan Dinas Sosial Kabupaten Ngawi dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan tabel di atas, tren nilai SKM dalam waktu 2 tahun terakhir menunjukkan pola yang penurunan. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Ngawi perlu ada perbaikan untuk mengoptimalkan kinerja pelayanan publik melalui berbagai upaya perbaikan

BAB III HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Dinas Sosial Kabupaten Ngawi periode Januari-Mei menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode Januari-Mei

No	Unsur	IKM
1	Persyaratan	0.444
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	0.426
3	Waktu Penyelesaian	0.380
4	Biaya/Tarif	0.444
5	Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan	0.435
6	Kompetensi Pelaksana	0.444
7	Perilaku Pelaksana	0.444
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	0.426
9	Sarana dan Prasarana	0.444

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Dinas Sosial Kabupaten Ngawi telah menyusun dan menindaklanjuti rencana tindak lanjut perbaikan pada 3 unsur terendah hasil SKM periode januari-mei. Berkaitan dengan hal tersebut, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai beriku

No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan ditambahkan tantangan/hambatan yang dihadapi)	Dokumentasi Kegiatan
1	Mengintensifkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan	sudah	Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan kualitas dan ketepatan waktu pelayanan. Hambatan yang dihadapi adalah keterbatasan waktu serta banyaknya kegiatan lain yang berjalan bersamaan.	
2	Penambahan tenaga pelayanan apabila dimungkinkan	sudah	Telah ada penambahan petugas pelayanan melalui pengajuan tenaga kontrak tambahan. Hambatan yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran dan proses administrasi yang	
3	Melakukan pembinaan petugas pelayanan	sudah	Pembinaan dilaksanakan melalui kegiatan bimbingan teknis dan pengarahan langsung dari pimpinan untuk meningkatkan kedisiplinan dan kualitas pelayanan. Hambatan: sebagian petugas memiliki jadwal tugas lapangan yang padat.	
4	Mengoptimalkan sarana dan prasarana	sudah	Dilakukan pengecekan rutin terhadap kondisi sarana prasarana serta perbaikan terhadap fasilitas yang rusak. Hambatan yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran untuk penggantian unit yang tidak layak.	
5	Menambah sarana dan prasarana pelayanan	sudah	Telah diadakan pengadaan tambahan peralatan pendukung pelayanan seperti komputer, meja, dan kursi. Hambatan: proses pengadaan membutuhkan waktu dan penyesuaian dengan ketersediaan anggaran.	

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Januari hingga Juni 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Sebanyak 330 orang mengisi SKM pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi di tahun 2025. Layanan Pemberian Bansos Beasiswa Bagi Mahasiwa Miskin menjadi layanan dengan pengguna terbanyak terlihat dari jumlah sampel yang mengisi survei yaitu 299 orang.
- Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Sosial Kabupaten Ngawi secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 93.03.
- Unsur pelayanan yang menjadi prioritas perbaikan yaitu prosedur pelayanan dan waktu penyelesaian
- Berdasarkan pelaksanaan tindak lanjut periode sebelumnya, Dinas Sosial Kabupaten Ngawi menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak 100%

Ngawi, 21 Oktober 2025

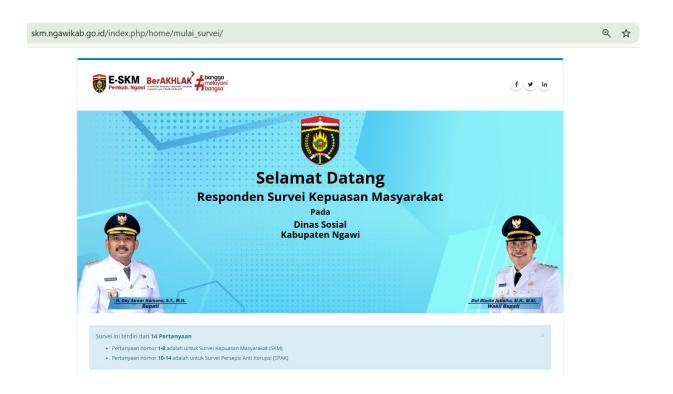
Kepala Dinas Sosial

INAS SO

BONADI, A.KS., M.M. NIP. 197103291994031008

LAMPIRAN

1. Kuesioner



2. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM (Foto-Foto Pelaksanaan SKM)





